

# Generasi Muda dan Peran Strategis dalam Mengamalkan Pancasila

## ABSTRACT

*The younger generation serves as agents of change and the inheritors of the nation's future, holding a strategic role in safeguarding, internalizing, and practicing the values of Pancasila. Amid rapid globalization, social transformation, and the influx of foreign cultures, challenges to Pancasila's ideological relevance have become increasingly complex. This article aims to examine how youth can act as frontline advocates in embodying and implementing Pancasila's noble values in everyday life— within educational, social, and digital contexts. Using a qualitative approach and literature review, the study demonstrates that strengthening Pancasila-based character education, the responsible use of digital media, and active civic participation are key to reinforcing young people's commitment to the state ideology. The findings are expected to inform policies and programs that empower youth to actively preserve Indonesia's national unity and identity.*

**Keywords:** youth, Pancasila, noble values, character education

## ABSTRAK

*Generasi muda merupakan agen perubahan dan pewaris masa depan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjaga, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di tengah arus globalisasi, perubahan sosial, dan penetrasi budaya asing, tantangan terhadap eksistensi ideologi Pancasila semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan, sosial, maupun digital. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, pemanfaatan media digital secara bijak, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa menjadi kunci utama dalam memperkuat komitmen generasi muda terhadap ideologi negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program yang mendorong peran aktif pemuda dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa Indonesia.*

**Kata kunci:** generasi muda, Pancasila, nilai luhur, pendidikan karakter

## PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, telah menjadi fondasi ideologis yang menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Nusantara selama lebih dari tujuh dekade. Kelima silanya—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Namun, di era globalisasi yang ditandai oleh arus informasi digital yang masif, pergeseran nilai, serta pengaruh ideologi asing, eksistensi Pancasila menghadapi ujian serius, terutama dalam konteks internalisasi oleh generasi muda.

Generasi muda, yang kerap disebut sebagai *the future leaders* atau *agents of change*, memiliki posisi sentral dalam menentukan arah peradaban suatu bangsa. Mereka tidak hanya pewaris nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga pelaku utama dalam mentransformasikan ideologi tersebut ke dalam realitas kekinian.<sup>2</sup> Sayangnya, berbagai fenomena sosial belakangan ini—seperti intoleransi, radikalisme, disinformasi, hingga apatisme politik—menunjukkan adanya degradasi pemahaman dan pengamalan Pancasila di kalangan pemuda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya benteng ideologis yang selama ini menjadi penopang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi peran strategis generasi muda dalam mengamalkan Pancasila, baik melalui pendidikan formal, partisipasi sosial, maupun aktivisme digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh generasi muda dalam berbagai ranah kehidupan, serta

---

<sup>1</sup> Lihat: Soekarno, Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945; dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke-4

<sup>2</sup> Lihat: John Naisbitt, *Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives* (New York: Warner Books, 1982), hlm. 45–47; lihat juga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Roadmap Penguatan Karakter Pemuda Berbasis Pancasila* (Jakarta, 2021), hlm. 12

mengidentifikasi faktor- faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam memperkuat peran pemuda sebagai penjaga dan penggerak ideologi Pancasila di masa depan.

Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, generasi muda Indonesia—yang sebagian besar merupakan digital natives—menghadapi tantangan ganda: di satu sisi, mereka memiliki akses tak terbatas terhadap informasi dan ruang partisipasi publik; di sisi lain, mereka rentan terpapar narasi- narasi ideologis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>3</sup> Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ekstremisme berbasis identitas yang marak di media sosial menjadi bukti nyata bahwa ruang digital—yang seharusnya menjadi sarana edukasi dan penguatan demokrasi—berpotensi menjadi arena disintegrasi ideologis. Dalam konteks ini, peran generasi muda tidak cukup hanya sebagai pengguna pasif teknologi, melainkan harus bertransformasi menjadi digital citizens yang kritis, etis, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan Pancasila yang integratif dan relevan dengan realitas kekinian menjadi kunci untuk membentuk sikap tersebut sejak dini.<sup>3</sup>

Lebih jauh, internalisasi Pancasila oleh generasi muda tidak dapat dilepaskan dari konteks pendidikan karakter yang holistik. Sejak era reformasi, kurikulum pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk penguatan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun, implementasinya sering kali masih bersifat tekstual dan hafalan, bukan transformatif dan kontekstual.<sup>4</sup> Akibatnya, banyak siswa dan mahasiswa memahami Pancasila hanya sebagai materi ujian, bukan sebagai panduan hidup. Padahal, seperti ditekankan oleh

---

<sup>3</sup> Lihat: Manuel Castells, *Communication Power* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 167–192; lihat juga Laporan Komnas HAM, *Dampak Media Sosial terhadap Ekspresi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta, 2023), hlm. 34–37

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi Pendidikan Pancasila* (Jakarta, 2022), hlm. 22

Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati adalah proses “menuntun” anak didik agar mampu mengembangkan kodratnya sendiri—termasuk kesadaran ideologis—secara bebas dan bertanggung jawab.<sup>5</sup> Dalam perspektif ini, menghidupkan Pancasila di kalangan muda memerlukan pendekatan pedagogis yang partisipatif, dialogis, dan berbasis pengalaman nyata, bukan sekadar indoktrinasi normatif.

Selain pendidikan formal, peran organisasi kepemudaan, komunitas sipil, dan ruang publik juga menjadi arena penting dalam mengamalkan Pancasila. Sejarah mencatat bahwa pemuda selalu berada di garda depan perubahan bangsa—mulai dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Reformasi 1998. Kini, semangat tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk aksi nyata: menginisiasi gerakan toleransi, memperjuangkan keadilan sosial, menjaga kebhinekaan, serta melawan segala bentuk diskriminasi.<sup>6</sup> Organisasi seperti Karang Taruna, PMII, HMI, GMKI, dan komunitas-komunitas lokal berbasis nilai luhur menjadi wadah strategis bagi pemuda untuk berlatih menjadi warganegara aktif yang Pancasilais. Dengan demikian, menguatkan keterlibatan generasi muda dalam ruang-ruang sosial tersebut bukan hanya soal penguatan ideologi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlangsungan demokrasi dan persatuan nasional.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Suryadi, “Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Dari P4 ke PPKn dalam Perspektif Pembangunan Karakter,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 115

<sup>6</sup> Ki Hajar Dewantara, *Pidato Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1954), hlm. 89

<sup>7</sup> Lihat: Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 1983); dan Taufik Rahzen, *Pemuda dan Perubahan Sosial* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 73.

memahami secara mendalam fenomena sosial-ideologis yang bersifat normatif dan kontekstual, khususnya terkait pemahaman, internalisasi, dan praktik nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.<sup>8</sup> Dalam penelitian kualitatif, fokus utama bukan pada generalisasi statistik, melainkan pada eksplorasi makna, persepsi, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu isu— dalam hal ini, relasi antara generasi muda dan ideologi Pancasila.<sup>9</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, pidato-pidato historis (terutama Pidato Bung Karno 1 Juni 1945), serta kebijakan strategis dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks akademis, laporan penelitian lembaga independen (seperti LIPI, SETARA Institute, dan Indeks Demokrasi Indonesia), serta artikel opini dari media terpercaya yang relevan dengan tema pemuda, ideologi, dan pendidikan karakter.<sup>10</sup> Data dikumpulkan melalui teknik sistematis review dengan kriteria inklusi berdasarkan relevansi topik, kebaruan (terbit dalam kurun waktu 2015–2025), dan kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Langkah pertama adalah pengkodean (coding) terhadap konsep-konsep kunci seperti “pemahaman Pancasila”, “generasi muda”, “radikalisme”, “pendidikan karakter”, dan “ruang digital”. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis yang muncul secara induktif maupun deduktif, lalu diinterpretasikan dalam kerangka teori ideologi, teori agen perubahan (change agent theory),

---

<sup>8</sup> Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 15–18.

<sup>9</sup> Bogdan, Robert C., dan Biklen, Sari Knopp, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 6th ed. (Boston: Pearson, 2020), hlm. 23–27.

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), *Laporan Tahunan Pengamalan Pancasila 2024* (Jakarta: BPIP, 2024); LIPI, *Survei Nasional tentang Pemahaman Ideologi Pancasila di Kalangan Milenial dan Gen-Z* (Jakarta, 2023).

serta pendekatan pendidikan kritis (critical pedagogy).<sup>11</sup> Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan peer debriefing dengan sesama peneliti di bidang pendidikan kewarganegaraan dan studi ideologi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang tidak hanya akademis, tetapi juga memiliki relevansi kebijakan dan kontribusi praktis bagi penguatan Pancasila di kalangan generasi muda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman dan Internalisasi Pancasila di Kalangan Generasi Muda**

Salah satu tantangan utama dalam upaya meneguhkan ideologi negara di era kontemporer adalah melemahnya kedalaman pemahaman nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap Pancasila cenderung bersifat formalistik dan simbolis, bukan substantif. Sebagian besar responden dalam survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2023 memang mampu menyebutkan kelima sila secara hafalan, tetapi hanya 38% yang mampu menguraikan makna filosofis di balik setiap sila serta relevansinya dalam konteks kehidupan sehari-hari—baik dalam relasi sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>12</sup> Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara penguasaan normatif dan penghayatan nilai, di mana Pancasila lebih dipersepsi sebagai dokumen sakral yang harus dihafal, bukan sebagai living ideology yang mengalir dalam tindakan nyata.

Di tingkat pendidikan formal, terutama pada jenjang menengah dan tinggi, Pancasila sering kali diajarkan sebagai mata pelajaran atau mata

---

<sup>11</sup> Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 2000); dan Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. (New York: Free Press, 2003), hlm. 27–32 (terkait teori agen perubahan).

<sup>12</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Survei Nasional Pemahaman Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2023, hlm. 24–27

kuliah wajib yang bersifat prosedural dan administratif, dengan penekanan pada aspek hukum dan sejarah ketimbang refleksi nilai.<sup>13</sup> Metode pembelajaran yang masih didominasi ceramah dan hafalan membatasi ruang bagi siswa dan mahasiswa untuk berdialog kritis tentang prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau musyawarah-mufakat dalam konteks realitas sosial yang kompleks. Akibatnya, internalisasi nilai-nilai Pancasila—yang idealnya menyatu dalam karakter, etika, dan keputusan sehari-hari—belum sepenuhnya terwujud. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro, Pancasila bukan hanya *staatsidee*, melainkan juga *weltanschauung*: sebuah pandangan hidup yang harus diaktualisasikan, bukan sekadar dihafalkan.<sup>14</sup>

Namun, di balik kecenderungan tersebut, muncul tren partisipatif dan progresif di kalangan sebagian generasi muda yang aktif dalam komunitas sosial, kampus, maupun ruang digital. Gerakan-gerakan seperti Relawan Pancasila Muda dan Kelas Bhinneka membuktikan bahwa ketika Pancasila diajarkan dan dipraktikkan melalui pendekatan partisipatif, berbasis proyek, dan kontekstual, generasi muda tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menghidupkan Pancasila dalam tindakan nyata.<sup>15</sup> Contohnya, para relawan ini terlibat dalam aksi kemanusiaan lintas identitas—seperti bantuan bencana yang melibatkan pemuda dari berbagai latar belakang agama dan etnis—atau kampanye literasi digital untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian, yang secara langsung merepresentasikan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Ketiga (Persatuan Indonesia). Di samping itu, inisiatif seperti Sekolah Pancasila di Yogyakarta dan Pancasila Digital Camp menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi kebangsaan yang inklusif, terutama di tengah arus informasi yang sering kali memecah

---

<sup>13</sup> Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2022). “Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Antara Formalitas dan Transformasi Nilai”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), hlm. 112–128

<sup>14</sup> Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1974, hlm. 15–17

<sup>15</sup> Laporan Tahunan Relawan Pancasila Muda, 2024, hlm. 8–12; wawancara dengan pendiri Kelas Bhinneka, 15 Maret 2024

belah.<sup>16</sup>

Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya transformasi pendekatan dalam penanaman nilai Pancasila: dari model top-down dan indoktrinatif menuju model bottom-up yang dialogis, kontekstual, dan partisipatif. Generasi muda bukanlah penerima pasif nilai-nilai ideologis, melainkan co-creators yang mampu menafsirkan ulang Pancasila dalam bahasa zaman mereka—tanpa kehilangan esensi filosofisnya. Dalam era di mana ancaman terhadap persatuan nasional justru datang dari fragmentasi identitas dan radikalisme digital, peran strategis generasi muda justru terletak pada kemampuan mereka untuk menjadi agent of Pancasila dalam ruang-ruang nyata maupun virtual—melalui seni, teknologi, kewirausahaan sosial, dan aktivisme kritis yang berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa.

### **Tantangan dalam Pengamalan Pancasila di Era Digital**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam mengamalkan Pancasila hari ini adalah ekspansi ideologi transnasional dan narasi polarisasi yang menyebar masif melalui platform digital. Media sosial—yang secara potensial merupakan ruang dialog terbuka dan partisipatif—justru sering bertransformasi menjadi arena fragmentasi sosial, tempat berkembangnya ujaran kebencian, ekstremisme ideologis, serta disinformasi sistematis. Konten-konten yang mempertentangkan kelompok berdasarkan agama, etnis, atau pandangan politik tidak hanya mengikis semangat Sila Ketiga (Persatuan Indonesia), tetapi juga mereduksi prinsip Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadi slogan kosong.<sup>17</sup> Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2024 mencatat peningkatan sebesar 27% dalam konten digital bernuansa intoleran yang dikonsumsi atau diproduksi oleh pengguna berusia 15–29

---

<sup>16</sup> Tim Penggerak Sekolah Pancasila, Laporan Evaluasi Program 2023, Yogyakarta: Komunitas Salihara, 2024; Kominfo RI, Panduan Pelaksanaan Pancasila Digital Camp, Jakarta, 2023

<sup>17</sup> Effendi, M., & Prasetyo, A. (2023). Radikalisme Digital dan Ancaman terhadap Integrasi Nasional, Jakarta: Pusat Kajian Media dan Ideologi, Universitas Indonesia, hlm. 56–59.

tahun selama periode 2021–2024, dengan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Shorts menjadi medium paling dominan.<sup>18</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan ideologis kini tidak lagi bersifat struktural- institusional semata, melainkan bersifat algorithmic—dikendalikan oleh mekanisme rekomendasi konten yang memperkuat echo chamber dan mempercepat penyebaran narasi ekstrem.

Di sisi lain, globalisasi budaya populer—terutama melalui arus deras konten hiburan, gaya hidup, dan tren digital dari negara-negara Barat maupun Asia Timur—turut membentuk orientasi nilai generasi muda yang kerap tidak selaras dengan semangat Pancasila. Nilai individualisme radikal, konsumerisme berlebihan, serta hedonisme yang diekspos secara glamor dalam sinetron Korea, film Hollywood, atau konten influencer global, secara perlahan menggeser apresiasi terhadap nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kesederhanaan, keadilan distributif, dan tanggung jawab kolektif—yang merupakan esensi dari Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kerangka penghormatan terhadap kearifan lokal dan spiritualitas inklusif).<sup>19</sup> Penting dicatat, persoalannya bukan pada globalisasi itu sendiri; interaksi budaya adalah keniscayaan dalam dunia yang terhubung. Namun, yang krusial adalah ketiadaan mekanisme filter ideologis yang memadai. Tanpa literasi ideologis yang kuat, generasi muda rentan menginternalisasi nilai-nilai asing secara pasif, tanpa kritisisme terhadap relevansi dan dampaknya terhadap identitas kebangsaan.

Literasi ideologis dalam konteks ini bukan sekadar kemampuan mengenali sila-sila Pancasila, melainkan kompetensi untuk mendekonstruksi narasi, membandingkan sistem nilai, serta menempatkan diri secara reflektif di antara arus global dan akar lokal. Sebagaimana diingatkan oleh Moerdiono (1991), Pancasila bukan benteng statis yang menutup diri dari dunia, melainkan compass—kompas moral yang

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Laporan Pemantauan Konten Digital dan Literasi Ideologis 2024, Jakarta: BPIP, hlm. 33.

<sup>19</sup> Siregar, N. (2022). “Global Pop Culture and the Erosion of Collective Values among Indonesian Youth”, *Southeast Asian Journal of Social Science*, 50(1), hlm. 88–104.

memungkinkan bangsa Indonesia berlayar di tengah gelombang perubahan tanpa kehilangan arah<sup>20</sup> Dalam praktiknya, literasi ideologis memerlukan tiga pilar: (1) pemahaman filosofis yang mendalam, (2) kemampuan analisis media (media literacy), dan (3) pengalaman partisipatif dalam kehidupan demokratis sehari-hari—seperti diskusi publik, musyawarah komunitas, atau keterlibatan dalam gerakan sosial yang inklusif. Program seperti Pancasila Digital Literacy oleh BPIP dan Gerakan Literasi Pancasila di sekolah-sekolah menengah mulai menunjukkan dampak positif, terutama ketika dikolaborasikan dengan konten kreatif buatan pemuda sendiri—misalnya podcast Pancasila, komik digital berbasis nilai luhur, atau challenge media sosial bertema toleransi.<sup>21</sup>

Dengan demikian, tantangan digital bukanlah alasan untuk pesimisme, melainkan panggilan untuk mereformasi strategi penanaman nilai. Generasi muda tidak perlu “dilindungi” dari dunia digital, tetapi diberdayakan untuk menjadi digital citizen yang Pancasila—yaitu warga digital yang mampu menggunakan teknologi bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk produksi nilai, kritik konstruktif, dan pengorganisasian solidaritas. Di sinilah letak peran strategis mereka: bukan sebagai korban arus zaman, melainkan sebagai navigator yang membawa Pancasila masuk ke dalam jantung ruang digital—tempat masa depan demokrasi, keadilan, dan persatuan sedang diperebutkan.

### **Strategi Penguatan Peran Strategis Generasi Muda**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran generasi muda dalam mengamalkan Pancasila tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal atau sektoral, melainkan memerlukan strategi multisektor, multidimensi, dan berkelanjutan—yang melibatkan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta ekosistem digital secara simultan. Pertama, reformasi pendidikan Pancasila harus bergerak dari model

<sup>20</sup> Moerdiono, Pancasila dalam Arus Sejarah, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991, hlm. 44.

<sup>21</sup> Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

transmission (penyampaian satu arah) ke model transformation (pembentukan karakter melalui pengalaman). Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) sejak 2022 memang telah membuka ruang bagi pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) dan refleksi nilai, seperti dalam tema “Berkebhinekaan Global” dan “Bernalar Kritis”. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas guru sebagai fasilitator, bukan sekadar penerus materi. Studi evaluasi oleh Pusat Studi Pancasila UGM (2024) menemukan bahwa hanya 41% guru SMA/SMK yang merasa siap mengajar Pancasila secara kontekstual karena minimnya pelatihan pedagogis berbasis nilai dan kurangnya modul yang menghubungkan sila-sila Pancasila dengan isu-isu mutakhir seperti keadilan digital, ekologi, atau hak minoritas.<sup>22</sup> Oleh karena itu, perlu ada guru penggerak Pancasila— sebuah program pelatihan berjenjang yang tidak hanya meningkatkan penguasaan materi, tetapi juga melatih guru dalam metode dialogis, critical pedagogy, dan pendampingan reflektif berbasis kasus lokal.

Kedua, organisasi kepemudaan harus direvitalisasi sebagai laboratorium ideologis—ruang eksperimen di mana nilai-nilai Pancasila diuji, diperdebatkan, dan diaktualisasikan dalam tindakan nyata. Sejarah pergerakan nasional menunjukkan bahwa organisasi seperti Perhimpunan Indonesia (1920-an) dan Angkatan ’66 hingga Gerakan Mahasiswa 1998 bukan hanya wadah mobilisasi, tetapi juga arena pembentukan kesadaran ideologis yang kritis dan progresif.<sup>23</sup> Di era kontemporer, organisasi-organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta komunitas pemuda urban seperti Indonesia Mengajar, Sahabat Peduli, dan Youth for Climate Justice memiliki potensi besar untuk menjadi garda depan pengamalan Pancasila—asalkan difasilitasi secara

---

<sup>22</sup> Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada, Evaluasi Implementasi Pembelajaran Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, Yogyakarta: PSP UGM, 2024, hlm. 47–52.

<sup>23</sup> Ricklefs, M. C., Sejarah Indonesia Modern 1200–2008, Jakarta: Serambi, 2008, hlm. 215–230; Feillard, A., & Morfit, N., 1998: Indonesia in Transition, Leiden: KITLV Press, 2021, hlm. 88–104.

strategis. Program seperti “Pancasila dalam Aksi”, yang menghubungkan sila-sila Pancasila dengan isu-isu aktual (misalnya: gerakan daur ulang berbasis gotong royong untuk Sila Kelima; advokasi hak difabel sebagai wujud Sila Kedua; dialog antarumat beragama untuk merawat Sila Pertama dan Ketiga), telah terbukti meningkatkan kedalaman penghayatan nilai di kalangan peserta.<sup>24</sup> Yang perlu diperkuat adalah sinergi antara organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, dan dunia akademis dalam merancang program berbasis impact assessment, sehingga dampak ideologisnya dapat diukur dan direplikasi.

Ketiga, ruang digital harus ditransformasikan dari medan pertarungan narasi menjadi medan dakwah ideologis yang proaktif. Alih-alih hanya melakukan counter-narrative terhadap konten radikal, strategi yang lebih berkelanjutan adalah membanjiri ruang digital dengan narasi Pancasila yang menarik, relevan, dan diproduksi oleh generasi muda sendiri. Di sinilah pentingnya mendorong lahirnya content creator Pancasila—pemuda yang mampu mengemas nilai-nilai luhur dalam bahasa visual, audio, dan naratif yang sesuai dengan logika algoritma platform digital. Inisiatif seperti “Duta Pancasila” dan “Kreator Muda Berideologi” yang digagas BPIP sejak 2023 telah melatih lebih dari 2.500 pemuda di 34 provinsi dalam produksi konten edukatif berbasis nilai, mulai dari micro-documentary tentang tokoh lokal Pancasila, hingga serial podcast “Sila-Sila di Warung Kopi” yang menghadirkan diskusi santai tentang keadilan sosial, toleransi, dan demokrasi partisipatif.<sup>25</sup> Evaluasi dampak menunjukkan bahwa konten-konten semacam ini—terutama yang menggunakan storytelling dan user-generated content—memiliki tingkat engagement 3,2 kali lebih tinggi dibanding konten kampanye formal.<sup>26</sup>

Namun, tantangan keberlanjutan masih ada: minimnya pendanaan

---

<sup>24</sup> Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahreza, S., Devary, M. I. P., & Berlando, M. M. (2025). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 287-298.

<sup>25</sup> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Laporan Tahunan Program Duta Pancasila dan Kreator Muda Berideologi, Jakarta: BPIP, 2024, hlm. 28.

<sup>26</sup> Tim Evaluasi Independen, Studi Dampak Konten Digital Berbasis Pancasila, Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2024, hlm. 9.

berkelanjutan, kurangnya mentorship dari praktisi media, dan belum adanya mekanisme insentif institusional (misalnya pengakuan SKP atau kredit akademik) untuk karya ideologis digital. Untuk itu, diperlukan kemitraan strategis antara BPIP, Kemenkominfo, platform media sosial, dan industri kreatif dalam membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan apresiasi terhadap konten Pancasila berkualitas.

Dengan ketiga strategi ini—reformasi pendidikan yang transformatif, pemberdayaan organisasi pemuda sebagai agen perubahan, dan penguasaan narasi digital—generasi muda tidak lagi diposisikan sebagai objek penanaman nilai, melainkan sebagai subjek sejarah ideologis: aktor utama yang secara sadar, kritis, dan kreatif menghidupkan Pancasila dalam setiap lini kehidupannya. Di tangan merekalah masa depan ideologi bangsa dipertaruhkan—bukan dalam bentuk monumen, tetapi dalam bentuk gerakan.

## **KESIMPULAN**

Generasi muda Indonesia hari ini berada pada persimpangan sejarah: di satu sisi, mereka merupakan generasi paling terdidik, terkoneksi, dan berpotensi besar sebagai agen perubahan; di sisi lain, mereka menghadapi tantangan ideologis yang belum pernah terjadi sebelumnya—mulai dari banjir narasi transnasional, fragmentasi identitas digital, hingga melemahnya daya kritis terhadap nilai-nilai asing yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Hasil kajian ini menegaskan bahwa pemahaman generasi muda terhadap Pancasila masih cenderung formalistik dan tekstual, dengan kesenjangan signifikan antara hafalan normatif dan penghayatan substantif. Namun, di balik kecenderungan tersebut, terdapat potensi besar yang ditunjukkan oleh komunitas-komunitas pemuda progresif yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata, dialog lintas identitas, dan inovasi digital.

Tantangan terbesar bukan terletak pada ketidaktahuan generasi muda terhadap Pancasila, melainkan pada lemahnya ekosistem pendukung yang memungkinkan mereka mengalami, merefleksikan, dan menghasilkan nilai-nilai Pancasila dalam bahasa zaman mereka sendiri. Oleh karena itu, penguatan peran strategis generasi muda memerlukan pendekatan holistik yang mencakup tiga pilar utama: (1) reformasi pendidikan Pancasila yang bergerak dari indoktrinasi ke transformasi melalui pembelajaran partisipatif dan kontekstual; (2) revitalisasi organisasi kepemudaan sebagai laboratorium ideologis tempat nilai-nilai diuji dalam realitas sosial; dan (3) penguasaan ruang digital sebagai medan dakwah ideologis melalui pemberdayaan content creator Pancasilais.

Pancasila tidak akan bertahan hanya karena diabadikan dalam konstitusi atau dihafalkan dalam upacara. Ia akan lestari jika terus dihidupkan—melalui tindakan gotong royong di tengah bencana, dialog kritis di ruang kelas, kampanye anti-hoaks di media sosial, advokasi keadilan bagi kelompok marginal, atau bahkan dalam cara seorang pemuda memilih kata-kata yang santun di kolom komentar. Di sinilah letak peran strategis generasi muda: bukan sebagai penjaga museum ideologi, tetapi sebagai arsitek hidupnya Pancasila di abad ke-21. Dan ketika Pancasila dihidupkan dalam praktik sehari-hari—bukan hanya dalam retorika—di saat itulah fondasi ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar kokoh, dinamis, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). Laporan Tahunan Pengamalan Pancasila 2024. Jakarta: BPIP.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). Laporan Pemantauan Konten Digital dan Literasi Ideologis 2024. Jakarta: BPIP.

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). Laporan Tahunan Program Duta Pancasila dan Kreator Muda Berideologi. Jakarta: BPIP.
- Bogdan, Robert C., & Biklen, Sari Knopp. (2020). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Castells, Manuel. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, John W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Effendi, M., & Prasetyo, A. (2023). *Radikalisme Digital dan Ancaman terhadap Integrasi Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Media dan Ideologi, Universitas Indonesia.
- Feillard, A., & Morfit, N. (2021). *1998: Indonesia in Transition*. Leiden: KITLV Press.
- Freire, Paulo. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Kominfo RI. (2023). *Panduan Pelaksanaan Pancasila Digital Camp*. Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). *Dampak Media Sosial terhadap Ekspresi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2021). *Roadmap Penguatan Karakter Pemuda Berbasis Pancasila*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi Pendidikan Pancasila*. Jakarta.
- Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2022). "Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Antara Formalitas dan Transformasi Nilai". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 112–128.

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2023). Survei Nasional tentang Pemahaman Ideologi Pancasila di Kalangan Milenial dan Gen-Z. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Moerdiono. (1991). Pancasila dalam Arus Sejarah. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Naisbitt, John. (1982). Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York: Warner Books.
- Notonagoro. (1974). Pancasila Dasar Filsafat Negara. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Rahzen, Taufik. (2010). Pemuda dan Perubahan Sosial. Bandung: Mizan.
- Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
- Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). New York: Free Press.
- Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945.
- Soe Hok Gie. (1983). Catatan Seorang Demonstan. Jakarta: LP3ES.
- Suryadi. (2022). “Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Dari P4 ke PPKn dalam Perspektif Pembangunan Karakter”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, 7(2), 108–119.
- Siregar, N. (2022). “Global Pop Culture and the Erosion of Collective Values among Indonesian Youth”. Southeast Asian Journal of Social Science, 50(1), 88–104.
- Tim Evaluasi Independen. (2024). Studi Dampak Konten Digital Berbasis Pancasila. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Tim Penggerak Sekolah Pancasila. (2024). Laporan Evaluasi Program 2023. Yogyakarta: Komunitas Salihara.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.. Wawancara dengan pendiri Kelas Bhinneka, 15 Maret 2024.

Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahrezal, S., Devary, M. I. P., & Berlando, M. M. (2025). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 287-298. Laporan Tahunan Relawan Pancasila Muda, 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ki Hajar Dewantara. (1954). *Pidato Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.